

No. : 047/S-Dir.HS/I/2024
Lamp : 1 Bendel

Ambarawa, 30 Januari 2024

Kepada

Yth. **Perbarindo Pusat** dan **Media BPR**
KOMP. PATRA II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

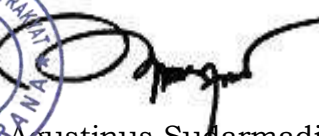
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment PT. BPR Hartasarana
Periode Tahun 2023

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment PT. BPR Hartasarana Periode Tahun 2023.

Demikian agar maklum.

PT. BPR Hartasarana
Hormat Kami,




Agustinus Sudarmadi
Direktur Utama

No. : 046/S-Dir.HS/I/2024
Lamp : 1 Bendel

Ambarawa, 30 Januari 2024

Kepada

Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**

Regional 3 Jawa Tengah dan DIY

Jl. Kyai Saleh No. 12-14

Semarang

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment PT. BPR Hartasarana
Periode Tahun 2023

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/Seojk.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment PT. BPR Hartasarana Periode Tahun 2023.

Demikian agar maklum.

PT. BPR Hartasarana
Hormat Kami,




Agustinus Sudarmadi
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Hartasarana

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666030-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601421-30012024103007

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

hartasarana@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

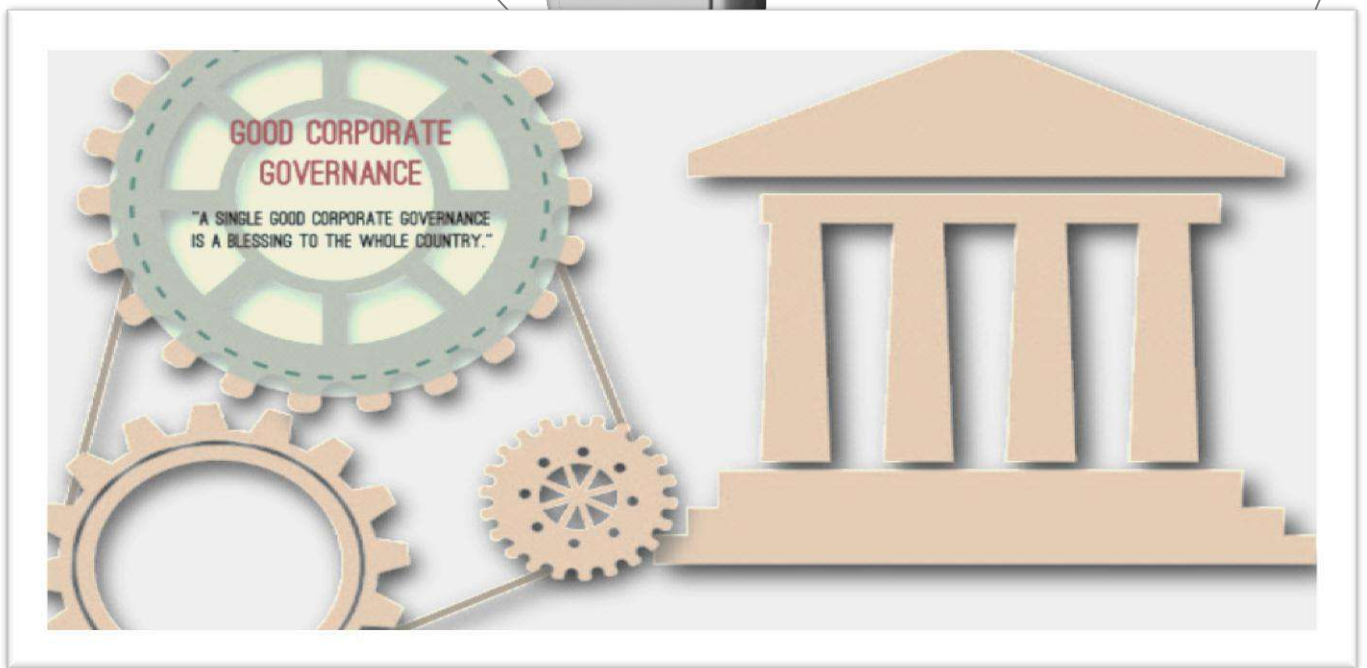
38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 10:30:07



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR HARTASARANA Tahun 2023



PT BPR Hartasarana
Jl Jend. Sudirman No 69 Ambarawa, Kabupaten Semarang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Jend Sudirman No 69 Ambarawa Kabupaten Semarang

Nomor Telepon : (0298)591595

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola PT. BPR Hartasarana Tahun 2023 dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara jelas tentang kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2023, PT BPR Hartasarana masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada usaha dan pencapaian rencana bisnis.. Transparansi Penerapan tata kelola ini menjadi penting karena tata kelola perusahaan yang baik tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan dan memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. BPR terus berkomitmen mendukung dan mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dimana di dalam proses penerapannya BPR melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan khususnya yang berhubungan dengan penyempurnaan Governance Structure atau Struktur Tata Kelola, optimalisasi tugas, wewenang, dan tanggungjawab pengurus BPR dan, serta penyempurnaan Governance Process atau Proses Tata Kelola di tengah tantangan yang dihadapi.. Dalam mengelola bisnis keuangan PT. BPR Hartasarana akan berpedoman pada prinsip-prinsip TARIF yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran (Fairness). Hal ini merupakan komitmen BPR untuk menciptakan Tata Kelola yang baik yang menghasilkan BPR yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah dengan baik. Serta didukung penerapan Manajemen Risiko meliputi risiko intern dan kualitas penerapan manajemen risiko yang digunakan untuk menilai perkembangan kondisi usaha dan keuangan BPR. Oleh karena itu PT. BPR Hartasarana akan selalu berkomitmen dalam mengelola BPR dimana senantiasa akan menerapkan tata kelola yang baik, dan hal-hal yang berkaitan dalam penyempurnaan pelaksanaan tata kelola akan dilakukan terus menerus dan berkesimbangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Agustinus Sudarmadi	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1.Menyusun anggaran dan Rencana Bisnis BPR (RBB), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai Rencana Bisnis BPR (RBB) dan RAKB.. 2.Memonitor dan mengevaluasi pencapaian Rencana Bisnis BPR dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).. 3.Menjaga keseimbangan likuiditas, permodalan dan perkreditan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik.. 4.Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan.. 5.Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan OJK, Dewan Komisaris dan Audit Intern.. 6.Meningkatkan keterampilan dan profesional sumber daya manusia.. 7.Menggunakan sumber daya yang dimiliki BPR secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang telah ditetapkan.. 8.Memastikan terlaksananya penerapan Fungsi Audit Internal BPR.. 9.Memastikan terlaksananya penerapan Tata Kelola dan Kepatuhan BPR.. 10.Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM BPR.. 11.Memastikan bahwa seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) dengan benar.. 12.Memastikan hasil temuan pemeriksaan baik internal maupun dari eksternal yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan BPR Hartasarana ditindaklanjuti dengan baik.. 13.Terkoordinasinya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, pendanaan, perkreditan, pemasaran dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya.. 14.Memastikan tercapainya pertumbuhan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio kredit bermasalah dan efisiensi BPR pada tingkat yang optimal.. 15.Memastikan pelaksanaan pemasaran dan perkreditan BPR berjalan dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.. 16.Memastikan terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat disekitar BPR.
2	Indra Kelana	Direktur	1.Menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BPR bersama Direktur Utama.. 2.Memonitor dan mengevaluasi pencapaian Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BPR.. 3.Memastikan aktivitas penyaluran kredit dilakukan secara aman dan lancar.. 4.Memonitor aktivitas penanganan kredit bermasalah.. 5.Mengevaluasi proses penyaluran kredit dan penanganan kredit bermasalah.. 6.Memberikan keputusan terkait penyaluran kredit.. 7.Menggunakan sumber daya yang dimiliki BPR secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang telah ditetapkan.. 8.Menindaklanjuti hasil evaluasi pemeriksaan OJK, Dewan Komisaris dan Audit Internal di bidang perkreditan.. 9.Memastikan terlaksananya pengendalian internal di bidang perkreditan.. 10.Mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit dengan aman dan lancar.. 11.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kerja pada bagian pendanaan dan perkreditan.. 12.Terjaminnya pelaksanaan aktivitas operasional penghimpunan dana dan penyaluran kredit BPR dengan baik, tertib dan lancar.. 13.Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi dewan komisaris antara lain . . 1. Direksi telah mengupayakan percepatan proses kredit melalui update aplikasi proses kredit. 2. Direksi telah mengupayakan peningkatan kualitas kredit (penurunan rasio NPL) namun demikian rasio NPL masih di atas 5 persen. 3. Direksi telah mengupayakan optimalisasi pendanaan (cash rasio sehat dan tidak idle fund). Direksi terus menjaga relasi dengan nasabah maupun bank lain.. 4. Direksi belum membuat rencana / jadwal aktivitas rencana pembukaan kantor cabang sesuai rencana bisnis pra-COVID-19. 5. Direksi telah melaksanakan pelatihan kepada staf yang mendukung analisis kredit serta memanfaatkan teknologi informasi (digital) dalam proses analisa kredit.. 6. Direksi telah melakukan rekrutmen karyawan untuk mendukung peningkatan kredit dan penurunan NPL

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Hari Sunarto	Komisaris Utama	<p>Komisaris Utama berfokus pada aspek-aspek yang terkait Analisis keuangan, penyaluran kredit, pendanaan, sistem pengendalian manajemen, manajemen risiko dan digitalisasi BPR serta perluasan jaringan usaha (pertumbuhan kredit, pertumbuhan pendanaan) dan pengelolaan Kantor. Bidang tugas & tanggung jawab secara terinci tetapi tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kegiatan operasional BPR berjalan normal taat pada peraturan, Direksi menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi audit internal, KAP, OJK serta Dewan Komisaris. 2. Melakukan Rapat Dewan Komisaris minimal 4X per tahun dengan risalah rapat yang disimpan salinannya. 3. Laporan tugas pengawasan selama tahun buku yang baru dan lampau kepada RUPS. 4. Melakukan Monev pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM, Manajemen Risiko, Fungsi Audit Internal BPR. 5. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6. Monev pelaksanaan kebijakan strategis BPR dan memberikan arahan (rekomendasi) kepada Direksi. 7. Tidak ikut campur tangan dalam kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait (terafiliasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan hal-hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang undangan. 8. Menyetujui rencana bisnis dan rencana aksi keuangan berkelanjutan BPR yang disampaikan kepada OJK. 9. Melaporkan pengawasan pelaksanaan rencana bisnis kepada OJK. 10. Menyetujui kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Direksi setelah melakukan percakapan/pembahasan. 11. Melakukan pengawasan (pengendalian) atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi. 12. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan yang belum tertuang dalam tugas-tugas tersebut di atas, dengan prinsip bekerja secara proaktif di dalam koridor wewenang dan tanggung jawabnya (find your jobs) sejauh diperlukan oleh Bank. 13. Meningkatkan kompetensi bidang pengawas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Bambang Ismanto	Komisaris	<p>Komisaris anggota akan fokus pada aspek-aspek perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan karyawan. Secara umum, komisaris memberikan konsultasi dan pengawasan manajemen SDM serta memberikan rekomendasi / solusi dalam menjamin keberlanjutan operasional dan pengembangan BPR.. 1. Memastikan kegiatan operasional BPR berjalan normal taat pada peraturan, Direksi menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi audit internal, KAP, OJK serta Dewan Komisaris. 2. Melakukan Rapat Dewan Komisaris minimal 4X per tahun dengan risalah rapat yang disimpan salinannya.. 3. Melaporan tugas pengawasan selama tahun buku yang baru dan lampau kepada RUPS.. 4. Melakukan Monev pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM, Manajemen Risiko, Fungsi Audit Internal BPR.. 5. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.. 6. Monev pelaksanaan kebijakan strategis BPR dan memberikan arahan (rekomendasi) kepada Direksi.. 7. Tidak ikut campur tangan dalam kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait (terafiliasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. (BMPK) dan hal-hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang undangan.. 8. Menyetujui rencana bisnis dan rencana aksi keuangan berkelanjutan BPR yang disampaikan kepada OJK.. 9. Melaporkan pengawasan pelaksanaan rencana bisnis kepada OJK.. 10. Menyetujui kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Direksi setelah melakukan percakapan/pembahasan.. 11. Melakukan pengawasan (pengendalian) atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi.. 12. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan yang belum tertuang dalam tugas-tugas tersebut di atas, dengan prinsip bekerja secara proaktif di dalam koridor wewenang dan tanggung jawabnya (find your jobs) sejauh diperlukan oleh Bank. 13. Meningkatkan kompetensi bidang pengawasan & pengendalian</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Prioritas Utama: 1.1 Mempercepat proses kredit & meningkatkan kualitas kredit (NPL di bawah 5 persen).. 1.2 Mengembangkan skim kredit sesuai kebutuhan masyarakat & tingkatkan layanan digital.. 1.3 Meningkatkan kompetensi SDM... 2. Kredit: 2.1 Mempercepat proses penyaluran kredit (investigasi, analisis kredit & keputusan). 2.2 Memantau kualitas kredit (NPL di atas 5 persen) & dan mengembangkan skim kredit inovatif... 3. Pendanaan: Sisi pendanaan masih memadai, namun relasi Bank dengan para nasabah harus dijaga oleh Direksi... 4. Perluasan Jaringan: Meneruskan rencana membuka kantor cabang sesuai rencana bisnis pra-COVID-19, dengan penjadwalan aktivitas yang jelas... 5. Digitalisasi: Direksi agar membuat action plan & melaksanakan pelatihan berikan pelatihan kepada staf yang mendukung analisis kredit dan transaksi dengan memanfaatkan teknologi informasi (digital). Pelatihan dapat dilakukan di luar jam kantor... 6. SDM: 6.1 Susun rencana pengembangan SDM.. 6.2 Rekrut karyawan baru & berikan pelatihan digital.. 6.3 Siapkan SDM untuk pembukaan kantor cabang Solo

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 13 Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko dan Fungsi kepatuhan. Sehingga PT. BPR Hartasarana tidak membentuk Fungsi Komite-komite, tetapi memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko dan Fungsi kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agustinus Sudarmadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Indra Kelana	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agustinus Sudarmadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Indra Kelana	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hari Sunarto	959.900.000	19,45
2	Bambang Ismanto	1.275.400.000	25,84

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris atas nama Bambang Ismanto adalah juga sebagai Pemegang Saham Pengendali pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hari Sunarto	PT Innikor Golden Mix	25,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki saham 25 persen di PT Innikor Golden Mix sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan bukan perbankan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Hari Sunarto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Bambang Ismanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada hubungan keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Hari Sunarto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Bambang Ismanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	486613650	2	131760000
2	Tunjangan	2	100547608	2	16020000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		587161258		147780000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh kebijakan Gaji, Tunjangan dan Remunerasi Pengurus ditetapkan dalam RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tunjangan perumahan untuk direksi dari luar kota dengan biaya sewa rumah untuk Direktur Utama sebesar Rp 20.000.000,- dan untuk Direktur Rp 16.000.000,- (2)	tidak ada
2	Transportasi	Pemberian fasilitas bahan bakar kendaraan maksimal 100 Liter per bulan untuk perjalanan dari rumah dinas ke kantor (2), Fasilitas tiket tol maks 2 kali dalam seminggu dan pulang pergi menjelang dan setelah libur nasional dari rumah kediaman direksi ke kantor (2), Bahan bakar dan tiket tol sesuai kebutuhan untuk operasional atau perjalanan dinas (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Ikut serta program BPJS kesehatan (2)	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Fasilitas pulsa untuk Direktur Utama sebesar Rp 300.000,- per bulan, dan untuk Direktur Rp 250.000,- per bulan. (2)	Fasilitas pulsa untuk Dewan Komisaris sebesar Rp 100.000,- per bulan. (2)

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua fasilitas diatas sudah diputuskan dalam RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,30	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,36	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4,20	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,72	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	07-03-2023	2	Realisasi (Feb. 2023) modal disetor tercapai 100 persen, dari Modal Dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp.6 miliar. Dewan Komisaris berkomitmen terus mengajak Pemegang saham untuk meningkatkan modal disetor baik berasal dari laba dan fresh money. Persiapan materi RUPS 2023 untuk tahun buku 2023 yang akan diadakan sekitar pertengahan Maret 2023, aspek yang menjadi perhatian Dewan Komisaris adalah tentang Alokasi Laba, Kapitalisasi laba/laba ditahan dan rencana penambahan modal disetor. Pilihan strategi bertumbuh, khususnya membuka Kantor Cabang masih terus menjadi bagian strategi jangka panjang. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan strategi ini kepada Direksi. Lambatnya perkembangan skala usaha karena lending (booking) atau penyaluran dana masih menghadapi kendala, khususnya kendala internal yaitu proses keputusan kredit belum bisa cepat yang ditinjau dari titik-titik bottleneck, dukungan teknologi informasi dan kebijakan insentif SDM. Hal ini terus menjadi pokok pembahasan rapat Pengurus untuk mencari solusinya.
2	07-06-2023	2	Pemantauan dan evaluasi (monev) Dekom atas perkembangan indikator kinerja utama (IKU), antara lain volume usaha yaitu melihat perkembangan Aset, penyaluran kredit, Outstanding loan, PPAP, NPL, AYDA dan kinerja AO, dan rasio rasio utama lainnya dari CAMEL. Semester I 2023, Dewan komisaris terus fokus mengamati perkembangan pemulihan usaha BPR yang secara makro pemulihan ekonomi mendahului BPR. Disini Dekom dan Direksi melakukan pembahasan tentang langkah langkah taktis untuk pemetaan dan perumusan kebijakan keuangan yang meningkatkan motivasi SDM, khususnya dalam (a) penyaluran kredit baru, dan (b) mengatasi kredit bermasalah. Keluhan Marketing dan analis kredit tentang sejumlah wilayah yang sudah mulai jenuh. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan analisis secara kritis. Direksi dan Dewan Komisaris berusaha memainkan instrumen marketing mix (4 P), khususnya suku bunga, termasuk diskon bunga dan untuk Service Marketing Mix (7 P) khususnya People (SDM) dan Process (mencari solusi bottleneck). Dewan Komisaris mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk terus memperkuat modal disetor dalam rangka persiapan membuka kantor cabang yang masih belum bisa direalisasikan. Melihat SDM sebagai aset strategis, pengurus tetap mengalokasikan dana untuk tetap memberi insentif kepada SDM. Upaya memanfaatkan teknologi informasi, adopsi Virtual Account melalui kerja sama dengan Bank Umum juga tetap menjadi agenda penting. Dewan Komisaris terus menerus memantau perkembangan Kantor kas Kec Mangu khususnya dari segi kemampuan SDM sebagai bagian strategi ekspansi. Untuk itu Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menyampaikan laporan ketika membahas ekspansi kredit.
3	20-09-2023	2	Dekom mengikuti Webinar yang diselenggarakan Perbarindo tentang hasil rilis BPR (Badan Pusat Statistik) Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen dibawah Tiongkok 6,3 persen, tetapi di atas Meksiko 3,7 persen dan Amerika Serikat 2,6 persen Juni 2023: Kredit perbankan sebesar Rp.6.656,1 T, tumbuh 7,76 persen. DPK sebesar Rp.7.950,6 T dengan pertumbuhan 5,79 persen dan NPL Gross sebesar 2,44 persen. Jumlah BPR/BPRS dari tahun 2020 cenderung turun dari 1.670 (2020), 1.631 (2021), 1.608 (2022) menjadi 1.584 (Juni 2023). Kondisi ini mendorong Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintensifkan AO dalam meningkatkan pencapaian target pelepasan kredit, efektivitas penagihan dan maintenance para debitur. Koordinasi Direksi Operasional dengan para AO dan FO administrasi kredit perlu dilakukan secara intensif target jumlah, waktu dan penurunan NPL. Secara riil sumber dana relatif mencukupi, maka Dewan Komisaris dan Direksi lebih memfokuskan dalam pemasaran kredit berkualitas dan penurunan NPL. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk meningkatkan tingkat kesehatan Bank agar tetap eksis dan berkembang. Hal ini untuk meningkatkan dukungan setoran modal Pendiri, dan kepercayaan masyarakat sebagai deposan dan debitur.
4	20-12-2023	2	1)Melakukan tindak lanjut Webinar OJK tentang SAK EP berlaku per 1 Januari 2025, dalam tahun 2024, BPR harus melakukan transisi. Masa transisi dari (1) PPAP (rule based) POJK 33/2018 ke (2) CKPN (principle base). Dewan Komisaris akan terlibat dalam satgas PT. BPR Hartasarana dalam rangka saling memperkaya pengetahuan dan implementasi bersama Direksi dan staf BPR. Proses transisi mencakup (1) menyamakan pemahaman konsep konsep (model) Expected Credit Loss = PD.LGD.EAD berdasarkan referensi yang relevan, khususnya hasil FGD OJK (2) metodologi statistik & akuntansi dan keuangan, (3) ketersediaan, penyediaan data BPR dan makro, (4) simulasi perhitungan internal dan menyelaraskan dengan Vendor Aplikasi CKPN BPR.. 2) Kinerja BPR berdasarkan beberapa indikator menjelang tutup buku dari segi Aset terjadi penurunan, yang diakibatkan oleh penurunan baki debit kredit yang diberikan. Kualitas Kredit terjadi penurunan, di atas 10 persen. Peningkatan NPL sangat berhubungan dengan ekspansi kredit yang tidak bisa mengimbangi pelunasan pokok.. 3)Direksi dan Dewan Komisaris telah membahas Rencana Bisnis BPR tahun 2024.. 4)Upaya ekspansi kredit melalui Kantor Cabang belum terealisasi. Memantapkan komitmen dan langkah Pengurus bersama seluruh pegawai untuk mewujudkan RBB 2024 termasuk pembukaan Kantor cabang.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Hari Sunarto	4	0	100,00
2	Bambang Ismanto	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat anggota Dewan Komisaris dilakukan 4 kali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan komisaris secara tatap muka.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 tidak ada penyimpangan Internal/ Internal Fraud pada operasional BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi sepanjang tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan di Tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230126	Kegiatan Sosial	Sumbangan acara Raker Gereja GKJ Salatiga Utara	Gereja GKJ Salatiga Utara	250.000
2	20230202	Kegiatan Sosial	Sumbangan acara persidangan Komisi Salatiga Bagian Utara XI Gereja GKJ Tahun 2023	Gereja GKJ Salatiga Utara	250.000
3	20230308	Kegiatan Sosial	Sumbangan iuran dan sosial Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 01 Ngesrep Boyolali	Rukun Tetangga 06 Desa Ngesrep Boyolali	480.000
4	20230330	Kegiatan Sosial	Sumbangan zakat infaq dan shodaqoh Kecamatan Ambarawa	Kecamatan Ambarawa	100.000
5	20230713	Kegiatan Sosial	Sumbangan pembangunan gapura utama Desa Tanjungsari RW 11 Ambarawa	Desa Tanjungsari Ambarawa	300.000
6	20230717	Kegiatan Sosial	Sumbangan kegiatan peringatan HUT RI Desa Dukuh Ngesrep Boyolali	Desa Dukuh Ngesrep Boyolali	250.000
7	20230807	Kegiatan Sosial	Sumbangan partisipasi penyelenggaraan kegiatan peringatan HUT RI ke 78 Kecamatan Ambarawa	Kecamatan Ambarawa	250.000
8	20230815	Kegiatan Sosial	Sumbangan HUT ke 66 Paroki Santa Maria Fatima Sragen	Paroki Santa Maria Fatima Sragen	500.000
9	20230821	Kegiatan Sosial	Sumbangan perayaan HUT RI ke 78 Desa Ngesrep Mangu Boyolali	Desa Ngesrep Mangu Boyolali	100.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian Dana untuk kegiatan Sosial sudah sesuai dengan Ketentuan Intern Bank

Nama BPR	: PT. BPR Hartasarana
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Jend Sudirman No 69 Ambarawa Kabupaten Semarang
Nomor Telepon	: (0298)591595
Modal Inti BPR	: 9.062.831.507,00
Total Aset BPR	: 26.837.365.597,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,3
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Tata Kelola , disimpulkan bahwa :. Hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan BPR, pencapaian nilai kompositnya 2,3 dimana memperoleh peringkat (2) atau Baik. Adapun hasil penilaian tersebut didasarkan oleh penilaian 11 faktor, dimana terkait tugas dan tanggung jawab Direksi maupun Dewan Komisaris untuk pencapaian rencana bisnis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.. Beberapa aspek khususnya peningkatan prinsip kehati- hatian pada risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas, peningkatan fungsi manajemen risiko dan internal audit pada semua aspek operasional Bank. Peningkatan kompetensi kualitas SDM dalam era digitalisasi. Dan perbaikan pemenuhan tindak lanjut temuan-temuan baik temuan audit intern maupun OJK. Penerapan Tata Kelola ini akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan pada tahun berikutnya dengan upaya peningkatan dan pemahaman serta budaya sadar risiko dari semua SDM PT BPR Hartasarana agar dapat bertumbuh dengan pengelolaan yang baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	1,15	0,30	2,45	0.490	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur telah terpenuhi namun pada proses penerapan perlu dilakukan pembenahan untuk mencapai hasil yang baik yaitu salah satunya dalam pemenuhan atau tindak lanjut temuan internal audit, peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam menunjang pelaksanaan kerja, pengelolaan Bank dengan meningkatkan kinerja dalam pencapaian pos-pos keuangan pada Bank khususnya dalam penyelesaian kredit bermasalah sehingga pencapaian rencana bisnis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	0,80	0,20	2,00	0.300	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola telah terlaksana dengan baik namun perlu peningkatan dalam pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memastikan telah ditindaklanjutinya temuan audit, peningkatan kompetensi SDM atau sesuai ketentuan yang berlaku serta pengawasan pelaksanaan kerja Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan memberikan rekomendasi dan nasihat secara tertulis untuk perbaikan guna pencapaian rencana bisnis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Mengingat modal inti BPR masih berada dibawah 50 M maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris, dan Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern , kepatuhan dan manajemen risiko..
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Penanganan benturan kepentingan pada Bank dilengkapi dengan tersedianya kebijakan dan prosedur internal dan pengaturan terkait pemberian kredit terhadap pihak terkait pada Bank dan karyawan serta tahun 2023, tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	1,04	0,20	2,44	0.244	Penerapan fungsi kepatuhan atas kelengkapan struktur dan infrastruktur terpenuhi namun dalam proses penerapan perlu dilakukan pembenahan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada setiap fungsi yang ada pada Bank untuk patuh dalam melaksanakan peraturan internal dan peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. PE Kepatuhan belum sepenuhnya bekerja secara maksimal mengingat rangkap jabatan dengan Manajemen Risiko dan APU PPT..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,30	1,10	0,20	2,60	0.260	Penerapan fungsi audit internal pada kecukupan struktur dan infrastruktur serta proses yang ada telah terpenuhi namun pada hasil yang diperoleh masih diperlukan pembenahan serta belum adanya program rekrutmen khusus untuk Audit Internal dimana memerlukan keahlian khusus. PEAI bekerja secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,60	0,20	1,80	0.045	Penerapan fungsi audit eksternal pada posisi akhir laporan keuangan menggunakan KAP Suratman , dimana penunjukannya dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai delegasi wewenang pada RUPS. Untuk hasil audit dituangkan dalam laporan keuangan hasil audit KAP dan tersedianya manajemen letter dengan ruang lingkup pelaksanaan audit berdasarkan peraturan OJK dengan melakukan Penunjukkan KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,08	0,20	2,62	0.262	Penerapan manajemen risiko telah dilengkapi dengan struktur dan infrastruktur yang cukup memadai dan terhadap proses dan hasil penerapan terlihat pada penilaian profil risiko yang diperoleh pada semester II Tahun 2023 yaitu terhadap jenis risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas meskipun dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan jenis risiko lain yang dapat timbul dikemudian hari atas kegiatan usaha/operasional yang akan dijalankan seperti risiko reputasi dan strategik. Atas penilaian profil risiko yang diperoleh Bank perlu meningkatkan proses penerapan manajemen risiko terhadap jenis risiko kredit terkait dengan masih terbentuknya kredit bermasalah, kredit Debitur besar dan meningkatnya kredit kualitas rendah akibat Debitur Dalam Pengawasan Khusus dan pemberian restrukturisasi kredit umum maupun terdampak Covid-19 dan mengembangkan budaya manajemen risiko terhadap seluruh jenjang organisasi, kepatuhan terhadap ketentuan internal dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit..
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,15	2,15	0.161	Bank memiliki kebijakan internal terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran/pelampauan BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	Rencana Bisnis Tahun 2023 disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, tahunan dan permasalahan yang dihadapi oleh Bank dan sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan RBB serta pengawasan RBB oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara semester dan disampaikan kepada OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,90	0,20	2,60	0.195	Bank telah memenuhi transparansi kondisi keuangan melalui penyampaian laporan keuangan/publikasi secara triwulan dan laporan tahunan dengan sistem informasi yang memadai, pelaksanaan transparansi produk yang dimiliki kepada setiap Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan Bank serta penyampaian laporan pengaduan Nasabah dengan tepat waktu kepada OJK..
Nilai Komposit						2.3	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Modal inti BPR kurang dari 50 M, jumlah anggota Direksi ada 2 orang, dan Direktur Utama merangkap Direktur YMFK
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direksi bertempat tinggal pada kota dan kabupaten yang berbeda tetapi pada provinsi yang sama yaitu Jawa Tengah
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Sudah sesuai ketentuan, tidak ada rangkap jabatan di Bank, Perusahaan Non Bank atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan / penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi sudah cukup baik dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi PEAI ,auditor ekstern dan pengawasan OJK namun belum sepenuhnya ditindaklanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi sudah cukup baik menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan strategis melalui kesepakatan kedua direksi, apabila terdapat perbedaan pendapat maka dicantumkan penjelasannya
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Semua gaji, remunerasi dan fasilitas yang digunakan Direksi sesuai keputusan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Belum sepenuhnya pegawai BPR mengikuti pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	4	Direktur perlu meningkatkan kompetensi manajemen risiko terhadap risiko kredit
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib Direksi
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	2,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,15	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Sudah sesuai ketentuan
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Tidak semua pegawai memahami kebijakan strategis yang disampaikan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	4	Dokumentasi Risalah rapat kurang rapi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	4	Perlu peningkatan keahlian dan kemampuan kepada seluruh pegawai dan Direksi agar pencapaian hasil terutama NPL dan laba sesuai ekspektasi stakeholders
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Modal inti BPR kurang dari 50 M, jumlah anggota Dewan Komisaris ada 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi yaitu 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Sudah sesuai ketentuan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal pada kota yang sama dan berbatasan langsung dengan lokasi Kantor Pusat BPR dan pada 1 provinsi yang sama Jawa Tengah
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja mencakup pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Komisaris merangkap sebagai Dosen Universitas Satya Wacana dan salah satunya juga sebagai Komisaris Independen pada PT Armada Finance
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Sudah sesuai, tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/ Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Modal inti BPR kurang dari 50 M, BPR tidak wajib mempunyai Komisaris Independen.
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui pertemuan rutin/ insidental
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Direksi menyampaikan laporan rutin yang menjadi materi dan dibahas dalam Rapat Pengurus. Materi yang disiapkan Direksi kemudian dilakukan analisis bersama sebagai proses evaluasi laporan tersebut. Atas dasar analisis yang dimaksud Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi alternatif yang dapat dilaksanakan jangka pendek, menengah atau dalam jangka panjang
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris hanya melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Hasil temuan-temuan yang dimaksud Direksi menyusun action plan sebagai materi Rapat Pengurus. Realisis action plan dipantau bersama dalam rangka memastikan bahwa temuan-temuan dapat diselesaikan dengan baik
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan, telah dituangkan dalam notulen/ risalah rapat Dewan Komisaris, rapat lainnya bersama Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris menggunakan gaji remunerasi dan fasilitas lainnya sesuai yang diputuskan RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris mendapat laporan kepatuhan rutin baik dari Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif kepatuhan. Dewan Komisaris melakukan pemantauan tentang kepatuhan dari pejabat tersebut dan Direksi khususnya yang membidangi Operasional
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Risalah Dekom didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Modal inti BPR di bawah 50 M, tidak wajib memiliki komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Modal inti BPR di bawah 50 M, tidak wajib memiliki komite
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Modal inti BPR di bawah 50 M, tidak wajib memiliki komite
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Modal inti BPR di bawah 50 M, tidak wajib memiliki komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Modal inti BPR di bawah 50 M, tidak wajib memiliki komite
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR sudah memiliki kebijakan benturan kepentingan , dan selama tahun 2023 tidak ditemukan benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sudah sesuai , selama tahun 2023 tidak ada benturan kepentingan dalam operasional Bank
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sudah sesuai , selama tahun 2023 tidak ada benturan kepentingan dalam operasional Bank
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direktur Utama merangkap sebagai Direktur YMFK dan tidak menangani penghimpunan maupun penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direktur YMFK sudah cukup baik memahami POJK dan SEOJK, serta peraturan perundang-undangan lain
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Sudah sesuai ketentuan, modal inti kurang dari 50 M menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang bekerja secara independen
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	PE Kepatuhan sudah cukup baik mengkinikan pedoman, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR sudah memiliki Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direktur YMFK sudah cukup baik menentukan langkah-langkah untuk pemenuhan semua peraturan yang berlaku dan selama tahun 2023 memenuhi semua kewajiban pelaporan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi sudah berupaya melakukan sosialisasi & pelatihan ketentuan terkini untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan namun belum semua pegawai mampu memahami secara mendalam
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Sebagian besar komitmen atas temuan OJK sudah ditindaklanjuti, kebijakan BPR terus dievaluasi sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan, dan memberikan opini sebagai tindakan pencegahan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Semua kebijakan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha selalu dilakukan evaluasi sesuai ketentuan namun belum sepenuhnya dikedirikan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan sudah merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur namun ada beberapa yang belum diputuskan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Selama tahun 2023 tidak ada pelanggaran ketentuan baik yang bersifat signifikan maupun tidak

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur Utama merangkap sebagai Direktur YMFK dan menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada OJK dengan tembusan ke Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada penyimpangan/ pelanggaran kebijakan/ ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Sudah sesuai ketentuan, dimana modal inti BPR di bawah 50 M, memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pedoman kerja auditor intern sudah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	PEAI independen terhadap operasional BPR
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR telah melakukan pengembangan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan bagi SDM fungsi audit intern, akan tetapi BPR belum memiliki program rekrutmen khusus audit intern
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Bank sudah cukup baik menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Bank, namun belum secara maksimal.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan audit intern di BPR mencakup persiapan, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan hasil audit dan tindak lanjutnya, pelaksanaannya sudah cukup memadai
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	PEAI sudah mengikuti pelatihan audit terkait Teknologi Informasi dan manajemen risiko namun belum maksimal dan masih perlu peningkatan kompetensi Audit
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE AI telah menyampaikan laporan kepada Dirut, Dekom dan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara berkala.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PEAI sudah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada OJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) diberikan skala penerapan Baik (2).

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Bank telah memenuhi semua aspek-aspek penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik sesuai cakupan POJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	KAP Suratman terdaftar di OJK dan penunjukannya telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan manajemen letter disampaikan ke BPR tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR memiliki modal inti di bawah 50 M dan sudah menunjuk 1 orang PEMR
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR sudah memiliki kebijakan namun perlu dilakukan pengkinian terhadap limit risiko sesuai kondisi Bank saat ini
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR sudah memiliki kebijakan risiko produk dan aktivitas baru yang cakupannya mempertimbangkan indentifikasi risiko
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi sudah menyusun kebijakan dan pedoman manrisk secara tertulis sesuai risiko pada POJK serta sudah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang perlu persetujuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dekom perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko khususnya risiko kredit
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Sudah dilakukan proses identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko namun belum secara maksimal dimana rencana tidak tercapai
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Sistem pengendalian intern belum dilakukan secara maksimal khususnya bagian kredit, namun sudah dilakukan secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menerapkan manajemen risiko minimal sesuai yang diwajibkan oleh ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi cukup memadai masih terdapat kelemahan dalam pengolahan dan penyajian data
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Tidak semua SDM pada BPR memahami lebih jauh mengenai budaya manajemen risiko yang disampaikan
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,08	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun dan menyampaikan Laporan profil risiko sesuai ketentuan OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2023 belum ada produk dan aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan BMPK sebagai bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Hartasarana
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR akan menyesuaikan kebijakan BMPK sesuai dengan ketentuan BMPK terbaru
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Selama tahun 2023 tidak ada pelanggaran BMPK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan telah disampaikan sesuai ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada pelanggaran BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis cukup menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan sesuai dengan ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis didukung oleh Pemegang Saham
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan semua aspek yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, termasuk pengendalian intern dan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR secara berkala dan membuat laporan semesteran pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan RBB kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah cukup memadai untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, walaupun masih terdapat beberapa perbaikan sistem oleh vendor, dan perlu peningkatan dalam hal SDM dan digitalisasi sistem.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan Laporan tahunan baik sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan, dan/ atau penggunaan data nasabah BPR, namun masih perlu peningkatan dan evaluasi dalam penyampaian ke nasabah agar nasabah mendapatkan pemahaman sesuai harapan Bank.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh paling sedikit 1 anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas, serta telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan Nihil pengaduan nasabah sudah disampaikan ke OJK tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hartasarana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR HARTASARANA Tahun 2023

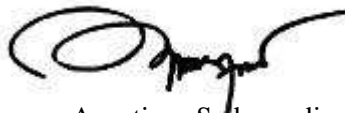
Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. POJK No. 03/ POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

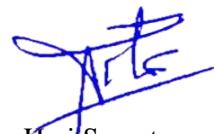
Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR HARTASARANA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Ambarawa, 30 Januari 2024

PT. BPR HARTASARANA



Agustinus Sudarmadi
Direktur Utama



Hari Sunarto
Komisaris Utama



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR HARTASARANA
Alamat	: Jl. Jend Sudirman No 69 Ambarawa Kabupaten Semarang
Nomor Telepon	: (0298)591595
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp9.062.831.507
Total Aset	: Rp26.837.365.597

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR HARTASARANA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.3 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.45	0.49
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	0.3
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.44	0.244
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.6	0.26
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.8	0.045
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.62	0.262
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.15	0.161
10	Rencana Bisnis BPR	2.2	0.165
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.6	0.195
Nilai Komposit			2.3
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.45)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur telah terpenuhi namun pada proses penerapan perlu dilakukan pembenahan untuk mencapai hasil yang baik yaitu salah satunya dalam pemenuhan atau tindak lanjut temuan internal audit, peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam menunjang pelaksanaan kerja, pengelolaan Bank dengan meningkatkan kinerja dalam pencapaian pos- pos keuangan pada Bank khususnya dalam penyelesaian kredit bermasalah sehingga pencapaian rencana bisnis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola telah terlaksana dengan baik namun perlu peningkatan dalam pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memastikan telah ditindaklanjutinya temuan audit, peningkatan kompetensi SDM atau sesuai ketentuan yang berlaku serta pengawasan pelaksanaan kerja Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan memberikan rekomendasi dan nasihat secara tertulis untuk perbaikan guna pencapaian rencana bisnis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Mengingat modal inti BPR masih berada dibawah 50 M maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris, dan Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern , kepatuhan dan manajemen risiko.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Penanganan benturan kepentingan pada Bank dilengkapi dengan tersedianya kebijakan dan prosedur internal dan pengaturan terkait pemberian kredit terhadap pihak terkait pada Bank dan karyawan serta tahun 2023, tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.44)

Penerapan fungsi kepatuhan atas kelengkapan struktur dan infrastruktur terpenuhi namun dalam proses penerapan perlu dilakukan pembenahan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada setiap fungsi yang ada pada Bank untuk patuh dalam melaksanakan peraturan internal dan peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. PE Kepatuhan belum sepenuhnya bekerja secara maksimal mengingat rangkap jabatan dengan Manajemen Risiko dan APU PPT.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.6)

Penerapan fungsi audit internal pada kecukupan struktur dan infrastruktur serta proses yang ada telah terpenuhi namun pada hasil yang diperoleh masih diperlukan pembenahan serta belum adanya program rekrutmen khusus untuk Audit Internal dimana memerlukan keahlian khusus. PEAI bekerja secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.8)

Penerapan fungsi audit eksternal pada posisi akhir laporan keuangan menggunakan KAP Suratman , dimana penunjukannya dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai delegasi wewenang pada RUPS. Untuk hasil audit dituangkan dalam laporan keuangan hasil audit KAP dan tersedianya manajemen letter dengan ruang lingkup pelaksanaan audit berdasarkan peraturan OJK dengan melakukan Penunjukkan KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada OJK.



8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.62)

Penerapan manajemen risiko telah dilengkapi dengan struktur dan infrastruktur yang cukup memadai dan terhadap proses dan hasil penerapan terlihat pada penilaian profil risiko yang diperoleh pada semester II Tahun 2023 yaitu terhadap jenis risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas meskipun dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan jenis risiko lain yang dapat timbul dikemudian hari atas kegiatan usaha/ operasional yang akan dijalankan seperti risiko reputasi dan stratejik. Atas penilaian profil risiko yang diperoleh Bank perlu meningkatkan proses penerapan manajemen risiko terhadap jenis risiko kredit terkait dengan masih terbentuknya kredit bermasalah, kredit Debitur besar dan meningkatnya kredit kualitas rendah akibat Debitur Dalam Pengawasan Khusus dan pemberian restrukturisasi kredit umum maupun terdampak Covid-19 dan mengembangkan budaya manajemen risiko terhadap seluruh jenjang organisasi, kepatuhan terhadap ketentuan internal dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.15)

Bank memiliki kebijakan internal terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran/pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.2)

Rencana Bisnis Tahun 2023 disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang, tahunan dan permasalahan yang dihadapi oleh Bank dan sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan RBB serta pengawasan RBB oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara semester dan disampaikan kepada OJK.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.6)

Bank telah memenuhi transparansi kondisi keuangan melalui penyampaian laporan keuangan/ publikasi secara triwulan dan laporan tahunan dengan sistem informasi yang memadai, pelaksanaan transparansi produk yang dimiliki kepada setiap Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan Bank serta penyampaian laporan pengaduan Nasabah dengan tepat waktu kepada OJK.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa: Hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang telah dilakukan BPR, pencapaian nilai kompositnya 2,3 dimana memperoleh peringkat (2) atau "Baik". Adapun hasil penilaian tersebut didasarkan oleh penilaian 11 faktor, dimana terkait tugas dan tanggung jawab Direksi maupun Dewan Komisaris untuk pencapaian rencana bisnis sesuai dengan target yang telah ditetapkan. . Beberapa aspek khususnya peningkatan prinsip kehati-hatian pada risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas, peningkatan fungsi manajemen risiko dan internal audit pada semua aspek operasional Bank. Peningkatan kompetensi kualitas SDM dalam era digitalisasi. Dan perbaikan pemenuhan tindak lanjut temuan-temuan baik temuan audit intern maupun OJK. Penerapan Tata Kelola ini akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan pada tahun berikutnya dengan upaya peningkatan dan pemahaman serta budaya sadar risiko dari semua SDM PT BPR Hartasarana agar dapat bertumbuh dengan pengelolaan yang baik.



PT. BPR HARTASARANA
Jl. Jend Sudirman No 69 Ambarawa Kabupaten Semarang
Telepon: (0298)591595
Website: hartasarana.com. Email: hartasarana@gmail.com

Ambarawa, 30 Januari 2024

PT. BPR HARTASARANA

Agustinus Sudarmadi
Direktur Utama



Hari Sunarto
Komisaris Utama